

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam konteks hukum perkawinan, perceraian menjadi opsi yang diatur oleh undang-undang ketika hubungan suami istri mengalami kegagalan yang serius. Dalam kasus ini, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum untuk perceraian jika salah satu pihak melakukan zina atau memiliki kecanduan yang sulit disembuhkan, seperti pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain

Perceraian berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 terjadi jika salah satu pihak melakukan zina, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ikatan perkawinan. Sedangkan, perceraian berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terjadi jika salah satu pihak terlibat dalam perilaku yang sulit disembuhkan, seperti kecanduan pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain. Alasan zina dan kecanduan yang sulit disembuhkan sebagai dasar perceraian memiliki signifikansi penting karena memberikan perlindungan bagi pasangan yang menjadi korban dari perilaku yang merusak hubungan perkawinan. Selain itu, alasan ini juga mencerminkan pentingnya keutuhan hubungan perkawinan dan

menjaga norma-norma moral dalam masyarakat. Dalam penerapan hukum perkawinan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan perceraian berdasarkan alasan zina atau kecanduan yang sulit disembuhkan. Faktor-faktor seperti kepentingan anak, bukti-bukti yang relevan, dan keadaan keluarga juga akan diperhatikan sebelum keputusan cerai diambil. Perubahan dalam pengaturan perselingkuhan dalam KUHP mengakui perlunya memberikan perlindungan terhadap korban dan mengatasi masalah

2. Perusahaan maskapai penerbangan harus menerapkan kebijakan yang jelas terkait etika kerja dan hubungan antar karyawan. Pendidikan dan pelatihan etika kerja juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya menjaga integritas di tempat kerja. Dalam mengatasi pelanggaran etika kerja, penerapan surat peringatan kerja dapat menjadi alat yang efektif. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa penerapan surat peringatan dilakukan dengan adil dan objektif, sesuai dengan peraturan dan standar industri penerbangan, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperbaiki perilakunya. Pengelolaan konflik yang efektif juga penting untuk mencegah masalah dan menyelesaikan konflik di tempat kerja. Perusahaan harus memiliki mekanisme yang transparan dan profesional untuk menangani konflik, serta memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan harus mengutamakan

keselamatan dan reputasi perusahaan dalam menghadapi perselingkuhan di antara pramugari dan pilot. Dalam industri penerbangan, citra profesionalisme dan integritas karyawan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas finansial maskapai menerapkan kebijakan etika kerja yang kuat, pengelolaan konflik yang efektif, dan mengutamakan keselamatan serta reputasi perusahaan, perusahaan maskapai penerbangan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan terpercaya. Hal ini juga akan membantu menjaga citra perusahaan sebagai lembaga yang profesional dan dapat diandalkan dalam industri penerbangan.

A. Saran

1. Kepada pemerintah harus melakukan pembaharuan Undang-Undang tentang perkawinan, pembaruan Undang Undang merupakan refleksi dari perkembangan zaman, nilai-nilai sosial, dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan undang-undang untuk beradaptasi dengan dinamika adalah kunci dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses perubahan undang-undang yang terbuka, inklusif, dan responsif sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas
2. Maskapai penerbangan perlu mengembangkan kebijakan etika kerja yang jelas dan komprehensif, termasuk aturan terkait moralitas,

etika, dan perilaku karyawan di lingkungan kerja, Memberikan pelatihan etika kerja kepada seluruh karyawan, termasuk pilot dan pramugari, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas di tempat kerja dan konsekuensi dari melanggar kebijakan. Mengembangkan mekanisme yang efektif untuk mengelola konflik di tempat kerja, termasuk menyediakan saluran komunikasi terbuka dan menetapkan tim yang terlatih untuk menangani konflik secara profesional. Menegakkan aturan dan kebijakan internal secara transparan dan konsisten, tanpa memandang status atau jabatan karyawan yang terlibat, untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus perselingkuhan. Ketika terjadi pelanggaran etika kerja atau tindakan pidana yang melibatkan karyawan, maskapai penerbangan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.